

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tingkat pemerintahan daerah, keberhasilan dalam mengelola keuangan dan aset daerah menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan alokasi dana yang efektif dan transparan guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti fluktuasi pendapatan, perubahan regulasi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo hadir sebagai lembaga yang harus adaptif terhadap dinamika ini, memastikan kelancaran dan ketertiban keuangan daerah. BPKPAD memiliki peran sentral dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Fungsi-fungsi seperti pengelolaan pendapatan daerah, penatausahaan aset, serta penjaminan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi bagian integral dari kontribusi BPKPAD dalam memastikan keuangan daerah yang sehat. Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi nilai utama dalam pengelolaan keuangan daerah. BPKPAD, sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap aspek ini, berperan dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat. Dalam menghadapi kompleksitas dan tuntutan yang semakin meningkat terhadap pengelolaan keuangan daerah, BPKPAD menjadi garda terdepan dalam memastikan keuangan daerah berjalan dengan baik serta memastikan manfaat maksimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BPKPAD dihadapkan pada tekanan untuk lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya dalam kompleksitas tuntutan tugas, sistem menjadi elemen yang krusial untuk mendukung operasional sehari-hari dan pencapaian tujuan strategis instansi. Implementasi sistem yang baik dapat memberikan peningkatan signifikan dalam efisiensi dan efektivitas

operasional instansi. Sistem menjadi alat utama dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Informasi keuangan, operasional, dan kinerja dapat dilacak dan diakses dengan mudah, serta memastikan pertanggungjawaban yang optimal, oleh karena itu sistem akuntansi dirancang untuk menjawab tuntutan tersebut dan memastikan bahwa instansi sesuai dengan ketentuan hukum serta mampu menjaga keseimbangan keuangan. Sistem akuntansi berperan sebagai instrumen kritis dalam mendukung pengawasan keuangan dan memastikan akuntabilitas yang tinggi, baik kepada manajemen internal maupun pemangku kepentingan eksternal, oleh sebab itu sistem akuntansi perlu ditelaah secara berkala sesuai dengan peraturan dan perubahan informasi atau kebutuhan instansi, salah satunya adalah mengenai sistem pengeluaran kas.

Kas merupakan aset yang paling likuid dan menjadi pondasi utama dalam menjalankan operasional suatu instansi. Kas diperlukan untuk memenuhi kewajiban finansial termasuk pembayaran utang dan kewajiban lainnya secara tepat waktu. Manajemen kas yang baik sangat penting bagi keberlanjutan dan kesehatan finansial suatu instansi. Melalui implementasi kebijakan dan praktik manajemen kas yang efektif, instansi dapat memastikan kelangsungan operasionalnya, merespons perubahan ekonomi dengan cepat, dan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan terkait kondisi keuangan instansi. Masalah kas menjadi suatu hal yang membutuhkan penanganan khusus, terutama dalam pengelolaan pengeluaran kas. Pengeluaran kas diperlukan untuk memenuhi kewajiban finansial, seperti pembayaran utang, pinjaman, dan kewajiban lainnya. Instansi perlu mengelola kas dengan bijak untuk menghindari potensi masalah keuangan, sehingga diperlukan sistem akuntansi pengeluaran kas untuk meminimalkan risiko dan memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kelangsungan keuangan daerah. Sistem pengeluaran kas menjadi unsur kritis dalam menjaga kestabilan keuangan dan memastikan alokasi dana yang tepat

sasaran. Adanya kerangka hukum yang mengatur pengeluaran kas menjadi landasan yang tidak bisa diabaikan. Pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi penting agar sistem pengeluaran kas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Adanya sistem pengeluaran kas yang baik dapat dipastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terjadi penyelewengan.

Uraian di atas telah dijelaskan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas sangat penting bagi instansi dalam hal ini pada BPKPAD agar sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku dan untuk menjaga kestabilan keuangan serta memastikan alokasi dana publik digunakan dengan tepat sehingga tidak terjadi penyelewengan. Paparan tersebut yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan observasi di BPKPAD Kabupaten Purworejo dan menuangkan dalam tugas akhir dengan judul “Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem akuntansi pengeluaran kas diterapkan pada BPKPAD Kabupaten Purworejo?
2. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran pada BPKPAD Kabupaten Purworejo?
3. Bagaimana bagan alir dan uraian sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKPAD Kabupaten Purworejo?
4. Laporan apa saja yang dihasilkan dari sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKPAD Kabupaten Purworejo?

5. Bagaimana pengendalian intern pada sistem akuntansi pengeluaran kas di BPKPAD Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKPAD Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat serta dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKPAD Kabupaten Purworejo.
3. Untuk mengetahui bagan alir dan uraian sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKPAD Kabupaten Purworejo.
4. Untuk mengetahui laporan yang dihasilkan dari sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKPAD Kabupaten Purworejo.
5. Untuk mengetahui pengendalian intern pada sistem akuntansi pengeluaran kas di BPKPAD Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan yang dapat diambil oleh berbagai pihak berdasarkan tujuan penulisan di atas adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis atau akademis

Manfaat teoritis atau akademis yang akan didapatkan oleh pembaca adalah pembaca akan mendapatkan ilmu, pengetahuan, atau wawasan tentang bagaimana sistem akuntansi pengeluaran kas di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis adalah penjelasan mengenai nilai kegunaan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah dalam berbagai keperluan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Manfaat praktis akan penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Bagi penulis
Manfaat tugas akhir ini bagi penulis sendiri adalah dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi terutama dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh pada waktu kuliah dengan kondisi yang sesungguhnya dalam dunia kerja.
- b. Bagi lembaga pendidikan
Manfaat tugas akhir ini bagi lembaga pendidikan yaitu dapat dijadikan referensi di Perpustakaan Politeknik YKPN Yogyakarta dan dapat menambah wawasan terkait perlakuan akuntansi pengeluaran kas pada instansi pemerintah daerah.
- c. Bagi instansi
Manfaat tugas akhir ini bagi instansi adalah memberikan sumbangan pemikiran juga penilaian kinerja instansi, membantu dalam mengambil keputusan atau langkah dalam menghadapi permasalahan yang timbul, serta sebagai bahan masukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja instansi.
- d. Bagi pembaca
Manfaat tugas akhir ini bagi pembaca yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas pada instansi pemerintahan daerah serta dapat dijadikan acuan referensi penulisan bagi mahasiswa Politeknik YKPN Yogyakarta.
- e. Bagi peneliti selanjutnya
Manfaat tugas akhir ini bagi peneliti selanjutnya adalah dapat menjadi bahan referensi dan sebagai bahan untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya.